

Di Pinggir Meiji Jingu: Menghadapi Ketidakadilan Spasial dalam Desain Arsitektural

Luthfi Baihaqi Riziq
Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada
luthfibaihaqiriziq@mail.ugm.ac.id

Imara Dzakia Ariyadi
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
imaradzakiaariyadi@mail.ugm.ac.id

Abstract:

Residents of the city of Tokyo witnessed the acceptance of the decision to demolish various sports facilities in the Meiji Jingu outdoor complex to accommodate tourism and office facilities. This was done despite receiving strong criticism from city residents and activist organizations, who claimed that the decision was taken without proper consultation with the public. This article will explore the urban context surrounding the planned redevelopment of the Meiji Jingu outer complex, taking into account the history and surrounding environment. Then, this article will argue that the redevelopment plan is ethically problematic because it creates spatial injustice. At the end, this article will also provide recommendations for making the plan spatially fair.

Keywords: *Meiji Jingu, spatial injustice, architecture, capital*

Abstrak:

Penghuni kota Tokyo menyaksikan penerimaan keputusan penggusuran berbagai fasilitas olahraga di kompleks luar Meiji Jingu untuk mengakomodasi pariwisata dan fasilitas perkantoran. Hal itu dilakukan meski menerima kecaman yang keras dari penghuni kota dan organisasi aktivis, yang mengklaim bahwa keputusan diambil tanpa konsultasi yang layak dengan publik. Artikel ini akan menyusuri konteks urban yang mengitari rencana pembangunan ulang kompleks luar Meiji Jingu, mempertimbangkan sejarah serta lingkungan sekitarnya. Kemudian, artikel ini akan berargumen bahwa rencana pembangunan ulang tersebut bermasalah secara etis karena menimbulkan ketidakadilan spasial. Di bagian akhir, artikel ini juga akan memberikan rekomendasi agar rencana tersebut dapat menjadi adil secara spasial.

Kata Kunci: Meiji Jingu, ketidakadilan spasial, arsitektur, kapital

Pendahuluan

Pada Februari 2023, Pemerintah Metropolitan Tokyo mengumumkan persetujuannya terhadap rencana untuk membangun ulang kompleks luar Meiji Jingu, area yang menjadi situs pembangunan sebuah kuil Shinto dalam rangka memperingati kematian Kaisar Meiji pada awal abad ke-20. Pembangunan ulang tersebut berencana akan menggusur dan memindahkan fasilitas olahraga berupa stadion bisbol dan stadion ragbi untuk menyediakan ruang bagi berbagai fasilitas pariwisata. Di antaranya adalah menara serbaguna 40 lantai, hotel 7 lantai, hotel 15 lantai, dan gedung perkantoran 38 lantai (Ward, 2019). Stadion bisbol dan ragbi akan dibangun kembali, tetapi di lokasi yang berbeda untuk mengakomodasi pembangunan gedung lainnya (Gambar 1).

Rencana pembangunan ulang tersebut menerima kecaman keras dari masyarakat Tokyo yang tidak merasa dilibatkan dalam prosesnya. Selain masalah transparansi yang tampak, rencana pembangunan ulang Meiji Jingu dikritik atas dasar warisan budaya dan dampak terhadap lingkungan. Stadion bisbol yang berdiri di dalam kompleks Meiji Jingu merupakan situs legendaris yang membawa kenangan aksi bisbol dari masa-masa silam; nama-nama seperti Babe Ruth dan Lou Gehrig selalu dibawa dalam narasi oposisi pembangunan ulang (mis. Wade, 2023). Selain itu, pembangunan ulang tersebut diperkirakan akan menebang ribuan pohon, termasuk pohon-pohon ginkgo yang berumur kurang lebih 100 tahun, meskipun Pemerintah Metropolitan Tokyo dan jajaran pendukung sering membantah perkiraan tersebut. Pada saat penulisan, perencanaan pembangunan belum mencapai konsensus antara pemerintah dengan publik dan masih ditunda. Desain yang digugat dalam artikel ini pun masih belum final.

Artikel ini akan membahas konflik keruangan yang terjadi di kasus perencanaan pembangunan ulang kompleks Meiji Jingu dan berargumen bahwa rencana tersebut bermasalah akibat keabaiannya terhadap kepentingan historis dan estetis yang diusung penghuni kota. Kritik di bagian akhir tulisan ini akan memberikan garis besar perubahan yang perlu dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan desain dalam perencanaan pembangunan ulang Meiji Jingu.



Gambar 1. Kompleks luar Meiji Jingu kini (atas) dan dalam rencana pembangunan ulang resmi (bawah). Sumber gambar: Google Earth, disorot oleh penulis (atas); Mitsui Fudosan Co. (bawah).

Etika untuk Lingkungan Binaan

Bagian ini mendiskusikan dengan ringkas cara desainer dan karya mereka dapat menghasilkan ketidakadilan dalam penataan ruang. Diskusi ini akan menghasilkan kerangka untuk mengidentifikasi ketidakadilan desain dalam kasus Meiji Jingu. Penulis akan menjabarkan pandangan-pandangan yang secara historis berada di dalam posisi bertentangan. Hal itu perlu dilakukan untuk menyediakan landasan yang paling relevan dalam konteks Meiji Jingu dan memungkinkan rekomendasi yang layak direalisasikan.

Lingkungan binaan (*built environment*) berada dalam oposisi dengan lingkungan alami, yakni ruang yang tidak dibentuk oleh manusia. Lingkungan binaan tidak hanya merujuk kepada daerah urban dengan gedung-gedung, tetapi juga persawahan yang secara sengaja dibuat manusia. Meskipun lingkungan binaan hanya mencakup sebagian kecil—sekitar 3%—dari keseluruhan permukaan Bumi (Liu et al., 2014), setidaknya 7 dari 8 milyar manusia hidup di dalam lingkungan binaan (United Nations, 2019). Dengan kata lain, lingkungan binaan adalah komponen yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari manusia. Setiap jengkal kehidupan kita, secara sosial, politis, ekologis, dan lainnya, dipengaruhi oleh lingkungan binaan yang kita bangun. Lingkungan binaan berada “di depan muka kita” (Fox, 2006: 101). Oleh karena itu, etika untuk lingkungan binaan menjadi urgen.

Konsep-konsep yang secara tradisional digunakan dalam etika, termasuk keadilan, juga digunakan ketika membahas arsitektur, desain urban, dan perencanaan penggunaan lahan. Dalam *The Just City* (2010), Fainstein berupaya merumuskan teori keadilan yang dapat diterapkan dalam latar urban. Menggunakan konteks Barat, Fainstein berargumen bahwa tiga kualitas primer perlu diperhatikan dalam membentuk keadilan urban, yakni ekualitas, demokrasi, dan diversitas. Bagi Fainstein, sebuah kota layak disebut adil jika distribusi material dan nonmaterial yang dibagikan melalui kebijakan publik tidak timpang ke kelompok yang telah memiliki keuntungan lebih di kondisi awal. Prioritas kebijakan publik terletak pada pengangkatan status kelompok yang lebih rentan dan miskin.

Selain itu, Fainstein menyerukan pengambilan keputusan urban yang lebih inklusif dan deliberatif. Dia menolak model perencanaan dan analisis kebijakan bersifat teknokratik serta positivistis yang cenderung menghasilkan keputusan *top-down*. Menurutnya, pendekatan demikian menampilkan ketimpangan kekuasaan dan keabaian terhadap nilai-nilai subjektif. Sebagai contoh, keputusan untuk mendanai konstruksi jalan tol dapat disetujui dengan bergantung kepada matriks yang secara murni kuantitatif, seperti perhitungan terhadap biaya proyek dan manfaatnya (*cost-benefit analysis*). Namun, keputusan itu dapat mengabaikan pertimbangan lain yang mungkin: mengalihkan dana untuk membayar perawatan kelompok rentan, efek polusi dari transportasi, atau nilai subyektif dari pengalaman seseorang terhadap rumahnya yang akan digusur untuk pembangunan jalan tol tersebut. Oleh karena itu, Fainstein mendukung model komunikatif-deliberatif dalam perencanaan urban. Partisipasi dari dan konsultasi dengan penghuni kota, terutama yang terdampak secara langsung, tidak boleh ditinggalkan untuk mencapai perencanaan yang demokratis (Fainstein, 2009).

Kualitas ketiga, yakni diversitas, merujuk kepada keberagaman etnokultural. Penulis tidak akan mengambil banyak dari Fainstein mengenai diversitas, terutama akibat penekanannya

terhadap etnis dan ras. Tokyo adalah kota yang hampir sepenuhnya homogen. Pada tahun 2020, penghuni beretnis Jepang membentuk 96,2% populasi Tokyo—13,5 juta dari 14 juta penghuni (Tokyo Metropolitan Government, n.d.). Hal ini tentu tidak berarti minoritas etnis dan rasial di Tokyo tidak penting. Partisipasi dari mereka juga turut diperlukan untuk merealisasikan bangunan dan kota yang demokratis. Penulis ingin menekankan bahwa dalam konteks konflik spasial, terutama yang berkaitan dengan ruang publik, semua orang yang menghuni—tanpa memandang etnis, ras, atau keberagaman lainnya—memiliki hak atas tempat yang mereka huni.

Diversitas dapat dimaknai secara lain. Kita tidak hanya dapat merujuk kepada keberagaman etnokultural, tetapi juga keberagaman fisik dalam arti varietas lanskap yang muncul di suatu kota (Fainstein, 2010: 68). Kita dapat mempertimbangkan tawaran yang diajukan oleh gerakan New Urbanism. Mereka berargumen bahwa forma fisik dari bentang kota memiliki dampak yang secara langsung memengaruhi perilaku manusia dan, pada gilirannya, masalah sosial (Gans, 1968; Garde, 2020; Domińczak, 2021). Gerakan New Urbanism muncul sebagai penentang perluasan perkotaan (*urban sprawl*) yang mengakibatkan homogenitas bentang kota. Perluasan perkotaan membuat sebuah kota hanya terlihat seperti kumpulan gedung. New Urbanism bermaksud mempromosikan kualitas hidup penghuni kota dengan membuat kota menjadi heterogen secara fisik. Tujuan dari pembentukan suatu kota, pada akhirnya, adalah peningkatan kualitas hidup penghuninya. Salah satu cara yang digadang oleh New Urbanism adalah penambahan ruang natural di kota, seperti ruang terbuka hijau, taman, dan pepohonan di sisi jalan. New Urbanism memiliki orientasi yang sama dengan psikolog lingkungan dalam hal ini: keduanya sependapat bahwa ruang natural di kota berdampak positif terhadap kesehatan fisik, sosial, dan mental para penghuni (Alexander & Wydeman, 2020; Gifford, 2014; Svendsen et al., 2016).

Desainer merupakan salah satu aktor utama dalam produksi lingkungan binaan. Dalam “triad konseptual” yang diajukan Lefebvre (1991: 39) untuk menganalisis ruang, ruang berposisi sebagai “yang-dipersepsi” (*the perceived*), “yang-dikonsepsi” (*the conceived*), dan “yang-dihidupi” (*the lived*). Ruang sebagai yang-dipersepsi—disebut “praktik spasial”—merujuk kepada aspek material dari praktik sosial, seperti interaksi antarindividu dalam sebuah masyarakat. Praktik spasial merupakan konsep yang menunjukkan bahwa pola sosial dan material saling terhubung (Çıdık, 2023) dan bertentangan dengan subordinasi spasialitas di bawah historikalitas dan sosialitas sebagaimana tampak dalam pemikiran filosofis Barat (Soja, 2009), bahwa sistem sosial bergantung kepada basis material semacam lingkungan binaan (Schmid, 2008).

Selanjutnya, ruang sebagai yang-dikonsepsi—“representasi ruang”—dijelaskan oleh Lefebvre (1991: 38) sebagai

“ruang yang dikonseptualisasi, ruang milik para ilmuwan, perencana, urbanis, subpembagi teknokratis dan perekayasa sosial, sebagai sejenis seniman dengan kecenderungan ilmiah—yang semuanya mengidentifikasi hal yang dihidupi dan hal yang dipersepsi dengan hal yang dikonsepsikan.”

Dengan kata lain, representasi ruang adalah domain yang didominasi oleh para akademisi dan profesional politis-teknis: dalam tataran diskursus sebagai perkataan, deskripsi, definisi, dan teori ruang; serta dalam tataran tanda sebagai peta, rencana, cetak biru, informasi dalam gambar, dan sebagainya (Prigge, 2008; Schmid, 2008). Inilah ruang yang di dalamnya terdapat peran serta desainer arsitektural. Mereka turut menciptakan representasi abstrak dari ruang yang “riil” (praktik spasial).

Terakhir, ruang sebagai yang-dihidupi—”ruang representasional”—adalah ruang sebagaimana dialami langsung oleh subjek dalam kesehariannya. Ruang representasional bersifat simbolis, mengubah ruang fisik menjadi ruang yang dapat diimajinasikan dan diberi makna (Lefebvre, 1991: 39). Ruang representasional memiliki peran dalam praktik sosial sebagai penghubung seorang individu dengan komunitasnya melalui penciptaan ikatan berdasarkan sejarah dan pengalaman menghidupi ruang yang sama (Stanek, 2011: 131).

Ketika berbicara mengenai desain, perhatian harus ditujukan kepada ruang sebagai yang-dikonsepsikan. Sebagai agen yang memiliki kontrol tertentu terhadap representasi ruang, desainer juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi praktik spasial. Diikuti pengetahuan dan ideologi, desainer mengintervensi produksi ruang (Lefebvre, 1991: 42). Dalam alur profesi mereka, desainer dengan demikian menjadi agen moral untuk menghasilkan desain yang adil. Konsep ketidakadilan desain (*design injustice*) sering ditawarkan dalam kerangka ideal desain partisipatoris (*participatory design*). Di dalam konsepsi desain partisipatoris, desainer bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk menghasilkan rencana yang mengakomodasi kebutuhan satu sama lain. Ketidakadilan terjadi dalam desain ketika terdapat pihak berkepentingan yang tidak terepresentasikan dalam proses perencanaan. Pihak berkepentingan yang dimaksud tidak hanya desainer, pengaju komisi, kontraktor, dan pemerintah. Jika perencanaan berkaitan dengan fasilitas yang menginklusi publik, publik juga memiliki kepentingan di dalamnya.

Kingwell (2021) memberikan gambaran besar kewajiban yang dimiliki arsitek dan desainer arsitektural baik sebagai profesional maupun sebagai subjek politik. Etika arsitektur yang dicanangkan Kingwell tidak semata-mata mencakup suatu subcabang etika yang disebut “etika profesional”—bahwa arsitek berkewajiban melayani klien dan menghargai rekan kerja. Dia juga merumuskan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang membedakan arsitek dengan profesi lain, seperti insinyur. Dua hal di antaranya adalah kewajiban untuk mencapai keindahan dan keadilan. Namun, keindahan tidak berada di ranah subjektif, tetapi di “medan perang kultural dan politis”; keindahan ditentukan oleh iklim di seputar arsitektur, termasuk politik dan tren di kalangan arsitek (Kingwell, 2021: 70; 76; lih. pula Piazzoni et al., 2022).

Searah dengan konsep representasi ruang Lefebvre, Kingwell (2021: 17) menyatakan bahwa “bangunan menciptakan lingkungan yang di dalamnya kebanyakan manusia bekerja, berhubungan, bermain, dan mengejar hasrat mereka” sehingga praktik desain dan arsitektur melibatkan kehidupan sehari-hari penghuni. Sebagaimana terhadap praktik sosial lainnya, posisi etis terhadap praktik desain dan arsitektur juga dapat dirumuskan. Arsitek dan desainer mengubah lingkungan natural menjadi lingkungan binaan. Dalam melakukan hal tersebut, mereka harus melakukannya dengan mempertimbangkan konteks urban: populasi, sejarah, geografi, dan lingkungan sekitar. Kingwell mengambil jalur Rawlsian dengan mendefinisikan

keadilan sebagai keberpihakan kepada kelompok yang tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, hal itu berarti arsitek dan desainer harus menghasilkan desain yang berpihak kepada penghuni kota, terutama kelompok penghuni yang tidak diuntungkan.

Apa posisi penghuni kota dalam membentuk kota yang ditinggalinya? Lefebvre (1996) mengajukan gagasannya mengenai “hak atas kota” (*the right to the city*) yang sepatutnya dimiliki penduduk kota. Kondisi urban memberikan orang-orang kesempatan untuk menghuni dan menjalani kehidupan urban. *Menghuni (inhabit)* bagi Lefebvre tidak hanya hidup dan menempati suatu ruang, tetapi juga mengambil peran dalam kehidupan sosial. Hak atas kota merupakan sebuah “panggilan dan tuntutan” agar penduduk kota mengambil alih kehidupan urban dan mencegah kota menjadi *habitat* fungsional yang hanya dikendalikan oleh kekuasaan kapital (Zieleniec, 2018).

Keluar dari alur pemikiran Marxian ortodoks, Lefebvre melihat bahwa inti dari konflik sosial adalah perebutan terhadap kontrol ruang (Soja, 1980). Dalam masyarakat industrial berekonomi kapitalis, produksi ruang berada di bawah kontrol pasar. Sebuah kota pun dapat menjadi objek untuk mencari keuntungan dan perdagangan hingga strukturnya berubah agar dapat menarik uang, wisatawan, dan investor (Biagi, 2020).

Gagasan-gagasan yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik untuk membentuk landasan teori yang sesuai untuk kasus Meiji Jingu. Hal yang diproblematikasikan dalam tulisan ini berada dalam domain desainer dan arsitek: ruang sebagai yang-dikonsepsi dalam rancangan. Namun, meskipun masih berada dalam ranah desain, pembangunan ulang kawasan luar Meiji Jingu dapat dikritik melalui konsep keadilan spasial yang diajukan oleh etika arsitektur dan etika untuk perencanaan urban: desain yang adil memenuhi ekualitas dan keberpihakan terhadap kelompok yang tidak diuntungkan, demokrasi dan hak atas kota, diversitas lanskap, serta orientasi terhadap peningkatan kualitas hidup, bukan pemusatan kapital.

Meiji Jingu: Dulu, Kini, dan Nanti?

Dalam bagian ini, gambaran umum dari Meiji Jingu dan kompleks luarnya akan dijabarkan untuk memahami signifikansi situs tersebut bagi warga Tokyo. Konteks urban yang mengitari awal pendirian dan perencanaan pembangunan ulangnya juga akan dijelaskan. Setelah mendeskripsikan sentimen dan kritik yang diterbitkan publik, bagian ini juga akan memberikan rasionalisasi tambahan untuk memperkuat kritik tersebut.

Karya Yoshiko Imaizumi (2013), *Sacred Space in the Modern City*, menjelaskan dengan detail sejarah dan fungsi Meiji Jingu. Selain sebagai simbol pengabdian Kaisar Meiji menjadi *kami*, Meiji Jingu merupakan lokus berbagai praktik spasial dan sosial-kebudayaan di Tokyo. Kuil itu sendiri merupakan tempat yang signifikan untuk praktik ritualistik-kultural Shinto. Area hutan seluas 70 hektar di sekitar kuil merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 120 ribu pohon dengan spesies yang beragam macam. Di barat daya kuil, terdapat Taman Yoyogi yang menjadi destinasi rekreasi penghuni kota setiap akhir pekan, mengundang kehadiran *cosplayer*, keluarga yang berpiknik, hingga orang tua yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Di samping

itu, kompleks luar Meiji Jingu menjadi tempat Galeri Gambar Memorial Meiji, Balai Memorial Meiji, serta berbagai stadion dan lapangan olahraga.

Dibanding kompleks bagian dalam yang lebih sakral akibat kehadiran kuil, kompleks luar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari penghuni Tokyo (Imaizumi, 2013: 12; lih. pula Di Giovine & Choe, 2019). Di kompleks luar, acara-acara seperti sumo, balap kuda, dan atletik dilaksanakan (Imaizumi, 2013: 12, 163). Kompleks luar menjadi tempat penghuni Tokyo untuk menemukan hiburan dan berolahraga. Melalui fasilitas yang tersedia dan upaya pemerintah untuk mempromosikan olahraga, kompleks luar Meiji Jingu menjadi tempat yang menginisiasi gagasan dan praktik kesehatan masyarakat, gizi, dan kesejahteraan jasmani (Imaizumi, 2013: 169-170)

Sedari awal, kompleks luar Meiji Jingu merupakan ruang milik publik. Meskipun pada akhirnya pengelolaan terhadap kawasan tersebut diberikan kepada organisasi keagamaan Meiji Jingu, kawasan luar hampir sepenuhnya dibangun menggunakan donasi publik yang digalang dari penduduk seluruh Jepang, tidak hanya Tokyo. Pemerintah Tokyo membentuk Komite Dukungan Kuil Meiji untuk menginisiasi penggalangan dana tersebut. Menggunakan dana yang dikumpulkan dari publik, Komite juga membeli tanah swasta seluas 2.870 meter persegi untuk dijadikan bagian dari kompleks luar. Bahkan, antara tahun 1919 dan 1922, sekitar 100.000 pria muda dari seantero Jepang dikirim ke Tokyo untuk membantu konstruksi kompleks dalam dan luar Meiji Jingu (Imaizumi, 2013: 28-29, 132, 26).

Kini, seperti yang Imaizumi implikasikan dalam judul bukunya, Meiji Jingu secara fisik berdiri sebagai anomali di kota Tokyo. Tokyo merupakan pusat urbanisasi besar-besaran pada 1920-an, titik awal urbanisasi Jepang. Pasca tragedi Gempa Besar Kanto—Tokyo berada di pertengahan dataran Kanto—yang terjadi pada tahun 1923 dan kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, 1945, bangunan tradisional tidak banyak tersisa (Hidenobu, 1995; lih. Gambar 2). Sebaliknya, pemerintah berusaha untuk membangun ulang Tokyo dengan mendirikan gedung modern yang tahan bencana alam. Ditambah, sejak 1980-an, Tokyo dijadikan “kota global” yang fungsinya secara ideologis diubah untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Jepang (Machimura, 1998). Gedung-gedung bertingkat terus dibangun seiring waktu, kebanyakan untuk keperluan perkantoran dan tempat tinggal, hingga terdapat lebih dari 500 gedung dengan tinggi lebih dari 100 meter pada tahun 2010 (Szolomicki & Golasz-Szolomicka, 2019).



Gambar 2. Bentang kota Tokyo

Pada tahun 2023, tanpa konsultasi publik yang adekuat, perencanaan kompleks luar Meiji Jingu hendak dirombak. Rencana pengembangan kompleks Meiji Jingu melibatkan pembangunan dua gedung pencakar langit dan satu bangunan tinggi multifungsi. Selain itu, stadion ragbi dan bisbol legendaris di sana juga akan digusur untuk pembangunan stadion penggantinya. Lapangan bisbol Keyakiya yang dapat dikunjungi untuk umum akan diubah menjadi lapangan tenis khusus anggota (ICOMOS, 2023; lih. Gambar 3). Pengembang dan Pemerintah Metropolitan Tokyo menyebutkan bahwa tujuan proyek tersebut adalah demi menjamin kebergunaan, keamanan, dan daya tarik fasilitas yang tersedia. Bangunan olahraga serta fasilitas rekreasi lainnya banyak yang telah berumur lebih dari seratus tahun. Pemerintah Metropolitan Tokyo juga menyebutkan bahwa kompleks luar Meiji Jingu memiliki ruang hijau yang terbatas untuk pejalan kaki, jalan yang tidak cukup dapat diakses, serta infrastruktur yang tidak adekuat, dan mengatakan bahwa ini adalah “kesempatan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana” (Exum, 2023; Tokyo Metropolitan Government, 2023).



Gambar 3. Lapangan bisbol Keyakiya dan area sekitarnya (kiri) dan rencana lapangan tenis khusus anggota (kanan). Sumber gambar: Penulis.

Kecaman keras datang dari penghuni kota dan organisasi aktivis atas dua dasar: (1) kawasan Meiji Jingu adalah situs warisan sejarah dan budaya milik publik yang harus dipreservasi dan tidak boleh diserahkan kepada kepentingan kapital; dan (2) pembangunan ulang kompleks luar mengurangi ketersediaan ruang natural. Stadion bisbol dan ragbi yang berencana digusur merupakan stadion yang legendaris hingga disebut “Mekah untuk penggemar olahraga” (McCurry, 2023). Penggemar olahraga yang menentang khawatir akan kehilangan pengalaman menonton pertandingan di tempat yang bersejarah. Namun, dua stadion tersebut harus digusur karena, di balik “kebergunaan, keamanan, dan daya tarik fasilitas”, pemerintah juga ingin mendirikan menara serbaguna, hotel, dan gedung perkantoran untuk menunjang ekonomi. Sampai-sampai, stadion bisbol dan ragbi hanya akan dibangun kembali di lokasi yang mengakomodasi akses ke gedung-gedung baru. Robert Whiting, jurnalis yang memulai petisi menentang rencana tersebut, menyebutkan bahwa pemerintah “hanya ingin menghasilkan uang dan mereka tidak terlalu peduli hal yang dipikirkan penghuni Tokyo” (McKirdy, 2023).

Dasar kecaman kedua datang dari kepentingan publik terhadap kehadiran pohon-pohon di kawasan Meiji Jingu. Pembangunan ulang kompleks luar akan melibatkan penebangan lebih dari seribu pohon, kebanyakan berumur lebih dari seratus tahun (ICOMOS, 2023). Hal yang menjadi perhatian publik, terutama, adalah Ginkgo Avenue, jalan sepanjang 300 meter yang diiringi pohon-pohon ginkgo (lih. Gambar 4). Sejumlah 146 pohon ginkgo di jalan tersebut memiliki umur yang bahkan lebih lama dari Meiji Jingu (Found Japan, 2023). Ginkgo Avenue menjadi populer sebab daun-daunnya berubah menjadi warna kuning pada musim gugur dan hanya dapat dinikmati dalam waktu singkat. Namun, perencanaan pembangunan ulang mengancam kelangsungan Ginkgo Avenue. Meskipun pengembang mengatakan bahwa pembangunan tidak akan menyentuh Ginkgo Avenue dan anak-anak pohon akan ditanam di tempat lain, ICOMOS membantah hal tersebut. Pembangunan stadion dan hotel baru dilakukan tepat di samping Ginkgo Avenue. Walaupun pembangunan di permukaan tidak akan mengenai pohon-pohon, konstruksi di dekat pohon-pohon tersebut akan menyebabkan kerusakan kepada akar mereka (lih. Gambar 5).



Gambar 4. Ginkgo Avenue pada musim gugur.



Gambar 5. Jarak stadion baru ke Ginkgo Avenue hanya 8 meter (ICOMOS, 2023). Sumber gambar: Penulis.

Exum (2023) melaporkan bahwa sejumlah kritikus menyayangkan transparansi dari Pemerintah selama berdeliberasi mengenai rencana pembangunan ulang Meiji Jingu. Mereka berargumen bahwa kompleks luar sedari awal seharusnya merupakan ruang publik: pendanaan awalnya berasal dari publik, banyak pohon merupakan donasi dari masyarakat, pemuda-pemuda yang awalnya datang ke Tokyo untuk membantu konstruksi juga bekerja sebagai relawan (Imaizumi, 2013: 26-29). Nyatanya, argumen serupa pernah dilontarkan pada 1950-an:

“Asano Kin’ichi, direktur utama Asosiasi Atletik Amatir Jepang, berargumen bahwa kompleks [luar] harus menjadi sebuah ‘institusi publik’, bukan ‘properti swasta dari sebuah kuil Shinto’. Bagi Asano, semua fasilitas olahraga di kompleks tersebut dikonstruksi dengan kontribusi dari orang di seluruh Jepang dan dengan ‘upaya kebaktian dari olahragawan’ Meskipun olahraga-olahraga tersebut mungkin didedikasikan kepada kuil Meiji sebagai ‘perayaan Shinto’, dalam praktiknya, mereka ‘semata-mata untuk tujuan olahraga dan rekreasi’ dan ‘tidak ada hubungannya dengan Shintoisme.’ Jika pihak kuil mengambil alih kepemilikan tanah, mereka akan memanfaatkan kompleks itu untuk ‘usaha yang menghasilkan uang’ atau bahkan akan menjual tanah tersebut.” (Imaizumi, 2013: 224)

Menanggapi upaya-upaya pengalihan kepemilikan Meiji Jingu ke pihak kuil, asosiasi olahraga menuntut agar kawasan dalam maupun luar diatur oleh organisasi nasional dan semua pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, sebuah badan dibentuk untuk mengatur penggunaan lahan Meiji Jingu. Perwakilan dari asosiasi olahraga, cendekiawan, dan ahli relevan menjadi anggota badan, sedangkan pendeta utama kuil akan menjadi ketua badan. Akan tetapi, setelah problematisasi lanjutan dari pemerintah, memorandum yang dideklarasikan oleh kementerian pendidikan, asosiasi olahraga, dan perwakilan kuil, akhirnya terbit. Di dalamnya, ketiga pihak sepakat untuk bekerja sama “merealisasikan penggunaan publik yang tepat” dari fasilitas yang tersedia di lahan Meiji Jingu (Imaizumi, 2013: 229-230).

Latar belakang di atas menjelaskan bahwa kegunaan kompleks luar Meiji Jingu memang ditujukan untuk kepentingan publik. Secara otomatis, publik menjadi pemangku kepentingan yang seharusnya bersifat paling otoritatif dalam menentukan pembangunan ulang Meiji Jingu. Dengan demikian, sangat disayangkan jika desain yang dihasilkan pengembang dan disetujui pemerintah justru abai terhadap kepentingan masyarakat untuk dapat mengalami ruang natural dan situs bersejarah di masa depan.

Berdasarkan landasan yang telah didirikan pada bagian sebelumnya, penulis berargumen bahwa desain pembangunan ulang Meiji Jingu dapat diproblematikasi dari segi keadilan spasial melalui empat poin: (1) komodifikasi ruang publik; (2) penurunan diversitas bentang kota; (3) deliberasi cacat; dan (4) kegagalan memenuhi kewajiban etis dalam praktik desain. Penulis akan menjelaskan empat poin tersebut secara berurutan.

Pertama, komodifikasi ruang publik. Motivasi pariwisata yang menjadi pertimbangan pembangunan ulang kompleks luar Meiji Jingu membuat keseluruhan area menjadi komoditas yang dijual pemerintah. Contohnya, perombakan lapangan bisbol Keyakiya di sisi timur kompleks luar Meiji Jingu dari yang sebelumnya merupakan fasilitas umum menjadi lapangan tenis yang ditujukan untuk anggota terdaftar merupakan keputusan yang tidak adil. Hal itu dikarenakan ruang milik publik dijadikan komoditas oleh pemerintah untuk memperoleh pemasukan. Keputusan ini merampas ruang yang sebelumnya milik publik untuk dijadikan ruang tertutup, hanya bisa diakses di balik dinding berbayar.

Kedua, penurunan diversitas bentang kota. Sejalan dengan orientasi global Jepang, Tokyo pun diupayakan menjadi lokus pertumbuhan ekonomi. Mekanisme untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan di Tokyo sesuai dengan pola urbanisasi kota-kota lainnya. Salah satu pola tersebut adalah pembangunan gedung-gedung bertingkat sebagai manifestasi kehadiran pemikiran modernisme dalam arsitektur. Dalam arsitektur modern, bangunan blok bertingkat merupakan forma yang masuk akal sebab fungsi lebih diprioritaskan daripada forma; “forma mengikuti fungsi”. Untuk menghasilkan ruang yang berujung kepada keuntungan ekonomis secara efisien, arsitek memilih menggunakan kaca dan beton bertulang yang kemudian dibentuk balok (Al-Zrigat, 2020; lih. pula Crinson, 2021). Hal ini mengakibatkan perluasan perkotaan sebagaimana dikritik oleh New Urbanism. Dampak dari perluasan perkotaan yang terjadi di Tokyo adalah penyempitan ruang natural, membuat bentang kota Tokyo menjadi semakin homogen seiring waktu. Melalui pembangunan ulang kompleks luar Meiji Jingu, Tokyo sedang menyaksikan hal yang sama. Desainer lebih memilih mengorbankan ruang natural untuk keperluan kapital dengan mendirikan gedung-gedung bertingkat baru. Kompleks luar Meiji Jingu seharusnya menjadi tempat rekreasi, ruang yang di dalamnya penghuni Tokyo dapat menikmati alam di tengah kota. Sebaliknya, ruang natural tersebut semakin menjadi artifisial.

Ketiga, deliberasi cacat. Sebagai penghuni kota, warga Tokyo memiliki hak atas kota yang mereka huni. Posisi tersebut seakan memiliki gradasi. Jika condong ke arah Marxian, hak penghuni tersebut semakin berlaku bahkan terhadap ruang-ruang privat di dalam kota. Posisi Marxian mungkin tidak diterima oleh semua pihak. Akan tetapi, argumen bahwa penghuni kota memiliki hak terhadap ruang publik sulit dibantah. Penghuni kota adalah publik dan publik *memiliki* ruang publik. Status kompleks luar Meiji Jingu sebagai ruang publik menjamin hak

penghuni Tokyo terhadap nasib tempat tersebut. Mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan teratas. Dengan demikian, deliberasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan publik seharusnya memperhatikan kepentingan publik. Namun, hal tersebut tidak tampak. Pada akhirnya, desain dan rencana awal diterbitkan tanpa keterangan jelas bahwa Pemerintah Metropolitan Tokyo pernah berkonsultasi dengan penghuni.

Keempat, kegagalan memenuhi kewajiban etis dalam praktik desain. Poin ini berhubungan dengan poin ketiga sejauh desainer memiliki kewajiban etis sebagai profesional untuk mengikuti komisi dari klien. Klien meminta desainer untuk memproduksi suatu desain, representasi dari ruang yang diinginkan klien. Sebagai profesional, desainer dituntut untuk menyukseskan desain tersebut. Akan tetapi, kewajiban terhadap klien hanya satu dari empat lapis kewajiban etis desainer. Desainer juga memiliki kewajiban untuk membuat desain yang mempromosikan keindahan dan keadilan untuk kehidupan sehari-hari penghuni. Dalam hal ini, nilai keindahan yang dibahas Kingwell sulit diterapkan karena kalkulasi terhadap keindahan memerlukan waktu—desain baru kompleks luar Meiji Jingu bahkan belum direalisasikan. Namun, problematisasi desain dari segi keadilan mungkin dilakukan. Desainer harus memastikan bahwa desain yang mereka hasilkan berpihak kepada kelompok yang tidak diuntungkan. Konteks ini menuntut agar desainer juga turut mendengarkan kepentingan penghuni Tokyo yang telah menyuarakan kecaman mereka terhadap desain pembangunan ulang ruang publik tanpa deliberasi yang adekuat.

Perubahan yang Diperlukan

Menggunakan konteks urban dan landasan keadilan spasial yang telah dijabarkan di atas, penulis akan merumuskan rekomendasi terhadap perubahan perencanaan secara garis besar sehingga dapat direalisasikan secara fleksibel. Pertama-tama, pertimbangan pemerintah untuk mendorong pembangunan ulang kompleks Meiji Jingu tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Jika fasilitas olahraga yang usang akan menyakiti atau mencederai pengguna, tidak berbuat apa-apa justru memunculkan problem etis yang lebih buruk. Untuk dapat dikatakan adil, sebuah bangunan harus dijamin aman melalui prosedur standardisasi yang sesuai dengan tiap tempat. Argumen pemerintah bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menjamin keamanan penghuni yang menggunakan fasilitas Meiji Jingu masuk akal.

Akan tetapi, problem muncul ketika rencana pemerintah adalah menggusur bangunan yang usang untuk digantikan dengan bangunan yang memiliki fungsi lain. Penulis berargumen bahwa, mengikuti sentimen Robert Whiting (McKirdy, 2023), keputusan untuk merenovasi lebih tepat. Bagian-bagian yang rusak dapat diperbaiki secara bertahap tanpa perlu menggusur keseluruhan bangunan yang berada dalam imajinasi publik. Penghuni kota, terutama penggemar olahraga, memiliki hak untuk mempertahankan stadion-stadion legendaris tersebut. Dari keputusan tersebut, kentara bahwa pemerintah lebih mementingkan arus kas yang masuk sebagai akibat dari pariwisata dan pajak pekerja kantor.

Keputusan untuk membangun gedung-gedung tinggi di area rekreasi penghuni Tokyo tidak adil sebab mengurangi akses penghuni terhadap ruang yang beragam di kotanya. Penghuni Tokyo sehari-hari hidup mengalami suasana urban yang ramai. Baik sebagai pekerja maupun

pengangguran, hidup di Tokyo meniscayakan interaksi rutin dengan ruang modern, simbol-simbol pertumbuhan ekonomi kota dan negara. Kompleks luar Meiji Jingu menjadi salah satu titik penghuni Tokyo untuk mengalami diversitas ruang. Namun, rencana membangun gedung bertingkat akan mengancam pengalaman tersebut. Ginkgo Avenue, ruang natural di tengah kota, berpotensi rusak dan mati. Dengan demikian, dalam rangka mempertahankan diversitas ruang Tokyo, rencana untuk bangunan-bangunan tinggi dapat dibatalkan atau dipindahkan ke lokasi lain. Perencanaan dan desain pembangunan ulang Meiji Jingu sebaiknya dilakukan tanpa mengusur dan memindahkan lokasi fasilitas olahraga.

Sampai di sini, penulis telah memberikan rekomendasi yang mungkin dilakukan. Akan tetapi, keputusan final tetap harus diserahkan kepada penghuni kota sebagai pihak publik yang *memiliki* kompleks luar Meiji Jingu. Rekomendasi utama untuk mengangkat ketidakadilan spasial dari proses perencanaan dan desain ulang Meiji Jingu adalah pengadaan dialog dan deliberasi dengan penghuni untuk mencapai konsensus. Kepentingan pertumbuhan ekonomi bisa jadi penting, tetapi Pemerintah Metropolitan Tokyo harus mendiskusikan cara terbaik untuk memenuhi hal tersebut tanpa meminggirkan suara penghuni.

Kesimpulan

Desainer adalah profesi yang mampu mengubah kontur lingkungan binaan yang berdampak terhadap kehidupan sehari-hari manusia, tidak untuk masa kini, tetapi justru untuk masa depan. Hakikat pekerjaan desainer menjadikan mereka berfungsi untuk membentuk forma tempat tinggal manusia dalam bentuk potensi (Cuff, 2023). Mereka bertindak sebagai perancang cetak biru yang akan digunakan teknisi dan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, mereka berperan dalam memajukan keadilan spasial bahkan sejak sebelum insinyur manapun melihat karya mereka. Hal yang sama berlaku dalam kasus pembangunan ulang kompleks luar Meiji Jingu. Desain yang dihasilkan dalam rencana kali ini belum sukses dalam menerapkan keadilan spasial. Hal itu dikarenakan desain pembangunan ulang tersebut akan menipiskan lanskap heterogen Tokyo, berorientasi kepada penanaman kapital, dan belum melibatkan deliberasi bersama publik. Untuk itu, desain masih dapat direvisi agar hasil jadi sesuai dengan kepentingan publik dan tidak berdampak buruk bagi kawasan sekitarnya.

Keputusan Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk membangun fasilitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi bisa jadi merupakan konsekuensi historis dari reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kaisar Meiji itu sendiri. Westernisasi dan modernisasi nasional Jepang dilaksanakan dengan semangat “pencarian pengetahuan dari seluruh dunia untuk memperkuat negara” (Steele, 2017). Hari ini, Jepang telah bertransformasi dari masyarakat tradisional dengan arsitektur kecil menjadi negara yang menerima, bahkan mendukung, kehadiran gedung-gedung tinggi untuk kepentingan negara. Namun, pemerintah tidak memiliki keharusan untuk terus membangun gedung bertingkat dan membuat Tokyo menjadi lebih homogen. Penghuni Tokyo membutuhkan ruang rekreasi dan ruang natural.

Daftar Pustaka

- Alexander, D., & Wydeman, B. (2020). The intersection and divergence of New Urbanism and environmental psychology: An exploration. *Frontiers in Built Environment*, 6. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2020.00061>.
- Al-Zrigat, Z. M. (2020). The impact of globalization on neoliberal architecture: How modern architecture has become a tool for control and compliance. *Journal of Civil & Environmental Engineering*, 10(4), 1-10. <http://dx.doi.org/10.37421/jcce.2020.10.350>
- Biagi, F. (2020). Henri Lefebvre's urban critical theory: Rethinking the city against capitalism. *International Critical Thought*, 10(2), 214-231. <https://doi.org/10.1080/21598282.2020.1783693>.
- Çıdık, M. S. (2023). Politics of social value in the built environment. *Buildings and Cities*, 4(1), 475-487. <https://doi.org/10.5334/bc.334>
- Crinson, M. (2021). What is modern architecture?. Dalam D. Lu (ed.), *The Routledge companion to contemporary architectural history*. Routledge.
- Cuff, D. (2023). *Architectures of spatial justice*. MIT Press.
- Di Giovine, M. A., & Choe, J. (2019). Geographies of religion and spirituality: pilgrimage beyond the 'officially' sacred. *Tourism Geographies*, 21(3), 361-383. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1625072>.
- Domińczak, M. (2021). Ideological identity of New Urbanism. *Architectus*, 2(66). <https://doi.org/10.37190/arc210206>.
- Exum, A. O. (2023). What to know about the Meiji Jingu Gaien redevelopment plan. *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/06/japan/explainer/jingu-gaien-redevelopment-explainer/>
- Fainstein, S. S. (2009). Spatial justice and planning. *Justice Spatiale|Spatial Justice*, 1. jssj.org/article/justice-spatiale-et-amenagement-urbain/.
- Fainstein, S. S. (2010). *The just city*. Cornell University Press.
- Found Japan. (2023, Juni 16). Meiji jingu gaien-Urban oasis begins redevelopment to become "a town that can be casually visited and enjoyed". https://foundjapan.jp/en/2306_meijijingu/
- Fox, W. (2006). *A theory of General Ethics: Human relationships, nature, and the built environment*. MIT Press.
- Gans, H. (1968). *People and plans*. Basic Books.
- Garde, A. (2020). New Urbanism: Past, present, and future. *Urban Planning*, 5(4), 453-463. <https://doi.org/10.17645/up.v5i4.3478>.
- Gifford, R. (2014). *Environmental psychology: Principles and practice*. Optimal Books.

- Hidenobu, J. (1995). *Tokyo: A spatial anthropology* (K. Nishimura, Penerj.). University of California Press.
- ICOMOS. (2023). Heritage alert: Jingu Gaien-cultural heritage as the core of Garden City Park System in Tokyo, which is facing immediate threat by urban redevelopment. *ICOMOS*. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2023/Heritage_Alerts/Jingu_Gaien/HA_JinguGaien_BackGroundINformation_20230905_with13Appendixes_compressed.pdf.
- Imaizumi, Y. (2013). *Sacred space in the modern city: The fractured pasts of Meiji Shrine, 1912-1958*. Brill.
- Kingwell, M. (2021). *The ethics of architecture*. Oxford University Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Penerj.) Blackwell.
- Lefebvre, H. (1996). Right to the city. Dalam E. Kofman, & E. Lebas (Eds.), *Writings on cities* (hlm. 61-181). Blackwell.
- Liu, Z., He, C., Zhou, Y., & Wu, J. (2014). How much of the world's land has been urbanized, really? A hierarchical framework for avoiding confusion. *Landscape Ecology*, 29(5), 763–771. <http://dx.doi.org/10.1007/s10980-014-0034-y>.
- Machimura, T. (1998). Symbolic use of globalization in urban politics in Tokyo. *International Journal of Urban and Regional Research*, 22(2), 183-194. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00134>.
- McCurry, J. (2023). 'Tokyo would lose its soul': anger over plans to redevelop historic city park. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/01/tokyo-anger-plans-redevelop-historic-city-park-meiji-jingu-gaien>
- McKirby, A. (2023). Tokyo approves plan to demolish historic Jingu Stadium despite public outcry. *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/sports/2023/02/17/baseball/japanese-baseball/jingu-stadium-tear-down/>
- Piazzoni, F., Poe, J., & Santi, E. (2022). What design for urban design justice?. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*. <https://doi.org/10.1080/17549175.2022.2074522>.
- Prigge, W. (2008). Reading The Urban Revolution: Space and representation. Dalam K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom, & C. Schmid (Eds.), *Space, difference, everyday life: Reading Henri Lefebvre* (46-61). Routledge.
- Schmid, C. (2008). Henri Lefebvre's theory of the production of space: Towards a three-dimensional dialectic. Dalam K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom, & C. Schmid (Eds.), *Space, difference, everyday life: Reading Henri Lefebvre* (27-45). Routledge.
- Soja, E. W. (1980). The socio-spatial dialectic. *Annals of the Association of American Geographers*, 70(2), 207-225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1980.tb01308.x>

- Soja, E. W. (2009). Taking space personally. Dalam B. Warf & S. Arias (Eds.), *The spatial turn: Interdisciplinary perspectives* (11-35). Routledge.
- Stanek, L. (2011). *Henri Lefebvre on space: Architecture, urban research, and the production of theory*. University of Minnesota Press.
- Steele, J. (2017). *Contemporary Japanese architecture: Tracing the next generation*. Routledge.
- Svendsen, E. S., Campbell, L. K., & McMillen, H. L. Stories, shrines, and symbols: Recognizing psycho-social-spiritual benefits of urban parks and natural areas. *Journal of Ethnobiology*, 36(4), 881-907. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-36.4.881>.
- Szolomicki, J., & Golasz-Szolomicka, H. (2019). Tokyo skyscrapers: technologically advanced structures in seismic areas. *International Journal of Architectural and Environmental Engineering*, 13(4), 215-225.
- Tokyo Metropolitan Government. (n.d.). Population of Tokyo. Tokyo Metropolitan Government. <https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/about/history/history03.html>.
- Tokyo Metropolitan Government. (2023). Jingu Gaien redevelopment project. Tokyo Metropolitan Government. https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2023/0206_01.html
- United Nations. (2019). World urbanization prospects: The 2018 revision. United Nations. <https://population.un.org/wup/Publications/>
- Ward, Z. (2019). Redevelopment details for Meiji Jingu Stadium district. *Japan Property Central*. <https://japanpropertycentral.com/2019/05/redevelopment-details-for-meiji-jingu-stadium-district/>